



## Krisis Pangan dalam Perspektif Hukum dan Sosiologi di Indonesia: Tantangan dan Prospek

Dwi Oktareza<sup>1</sup>, Andrean Noor<sup>2</sup>, Erlyando Saputra<sup>3</sup>, Aulia Vivi Yualianignrum<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 30, 2024

Revised Juni 10, 2024

Accepted Juni 16, 2024

#### Kata Kunci:

Krisis Pangan, Perspektif Hukum dan Sosiologi, Tantangan Dan Prospek

#### Keywords:

Food Crisis, Legal And Sociological Perspectives, Challenges And Prospects

### ABSTRAK

Krisis pangan di Indonesia menjadi perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tulisan ini menganalisis krisis pangan dari perspektif hukum dan sosiologi, menggali dampaknya secara mendalam pada masyarakat Indonesia. Dalam pendekatan hukum, penelitian ini menyoroti bagaimana kebijakan dan regulasi yang ada, seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, diimplementasikan serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis ini juga mencakup peran pemerintah dan pengaruh perjanjian internasional terhadap kebijakan pangan nasional. Dari perspektif sosiologi, penelitian ini mengeksplorasi dampak krisis pangan terhadap kelompok rentan, ketimpangan akses pangan antara wilayah urban dan rural, serta adaptasi sosial masyarakat dalam menghadapi krisis tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana peraturan hukum dan faktor sosial saling mempengaruhi dalam konteks krisis pangan, serta bagaimana masyarakat dapat diberdayakan untuk mengatasi tantangan ini. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik di Indonesia. Melalui reformasi kebijakan, penggunaan teknologi pertanian modern, dan penguatan inisiatif lokal, diharapkan dapat tercipta langkah-langkah strategis untuk mengatasi krisis pangan di masa depan.

### ABSTRACT

*The food crisis in Indonesia has become a serious concern over the past few decades, affecting various aspects of society. This paper analyzes the food crisis from legal and sociological perspectives, examining its deep impact on Indonesian communities. From a legal standpoint, the study highlights how existing policies and regulations, such as Law No. 18 of 2012 on Food, are implemented and the challenges faced in their enforcement. This analysis also includes the role of the government and the influence of international agreements on national food policy. From a sociological perspective, the research explores the impact of the food crisis on vulnerable groups, the disparity in food access between urban and rural areas, and social adaptation strategies employed by communities. This approach aims to understand how legal regulations and social factors interact in the context of the food crisis, and how communities can be empowered to overcome these challenges. The study seeks to provide deeper insights and sustainable solutions to achieve better food security in Indonesia. Through policy reforms, the use of modern agricultural technology, and strengthening local initiatives, it is hoped that strategic measures can be developed to address future food crises.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

**Dwi Oktareza**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur,  
Samarinda, Indonesia  
Email: eza1310@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN

Krisis pangan telah menjadi perhatian global yang signifikan, dan Indonesia tidak terkecuali. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan ketersediaan dan akses pangan yang memadai untuk seluruh warganya. Menurut laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO), ketahanan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan fluktuasi harga pangan global [1]. Perubahan iklim, seperti kekeringan dan banjir, telah mengganggu produksi pertanian, sementara pertumbuhan populasi yang cepat meningkatkan permintaan pangan secara signifikan. Selain itu, ketergantungan pada impor pangan juga membuat Indonesia rentan terhadap fluktuasi harga di pasar internasional [2]. Tantangan ini membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidisipliner untuk diatasi.

Dari perspektif hukum, krisis pangan di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan dan regulasi, seperti UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh penduduk. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan [3]. Namun, implementasi kebijakan ini sering kali menemui kendala seperti kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, birokrasi yang kompleks, serta korupsi [4]. Misalnya, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai program untuk mendukung ketahanan pangan, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak efektif karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang buruk [5]. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi yang ada cukup komprehensif, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari optimal [6].

Secara sosiologis, krisis pangan memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat Indonesia. Ketimpangan akses pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi salah satu isu utama, di mana masyarakat di daerah terpencil sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh pangan yang cukup dan bergizi [7]. Di daerah pedesaan, infrastruktur yang kurang memadai dan biaya transportasi yang tinggi seringkali menjadi hambatan utama dalam distribusi pangan [8]. Selain itu, kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia sangat terdampak oleh krisis pangan, yang dapat mengakibatkan malnutrisi dan berbagai masalah kesehatan lainnya [9]. Misalnya, data UNICEF menunjukkan bahwa prevalensi stunting dan wasting di kalangan anak-anak Indonesia masih tinggi, terutama di daerah-daerah miskin [10]. Adaptasi sosial masyarakat dalam menghadapi krisis ini juga beragam, mulai dari penggunaan jaringan sosial hingga strategi coping seperti berkebun di rumah atau mengandalkan bantuan dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah [11]. Ketahanan sosial komunitas sering kali memainkan peran penting dalam mengatasi kekurangan

pangan, dengan banyak keluarga yang berbagi sumber daya dan saling mendukung dalam masa-masa sulit [12].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis krisis pangan di Indonesia dari sudut pandang hukum dan sosiologi, guna memahami bagaimana peraturan hukum dan faktor sosial saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh krisis pangan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini. Melalui reformasi kebijakan, penerapan teknologi pertanian modern, dan pemberdayaan inisiatif lokal, ada potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia dan memastikan kesejahteraan seluruh warganya [13]. Reformasi kebijakan dapat mencakup penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi, dan peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah. Penerapan teknologi pertanian modern, seperti penggunaan varietas tanaman tahan hama dan perubahan iklim, serta sistem irigasi yang lebih efisien, dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi kerentanan terhadap faktor eksternal [14]. Selain itu, pemberdayaan inisiatif lokal melalui program-program seperti kebun masyarakat dan bank pangan dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di tingkat komunitas dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal [15].

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis krisis pangan di Indonesia dari perspektif hukum dan sosiologi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para ahli dan praktisi di bidang hukum, kebijakan pangan, dan sosiologi, termasuk pejabat pemerintah, akademisi, peneliti dari lembaga think tank, dan aktivis organisasi non-pemerintah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan pangan, tantangan hukum yang dihadapi, serta dampak sosial krisis pangan terhadap masyarakat. Data sekunder dikumpulkan dari laporan pemerintah, publikasi akademis, laporan dari organisasi internasional seperti FAO dan UNICEF, serta artikel jurnal yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis tematik, yang mencakup transkripsi data, koding, dan penyusunan tema. Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Pendekatan interdisipliner menggabungkan analisis hukum dan sosiologis untuk memberikan gambaran komprehensif tentang krisis pangan di Indonesia. Validasi temuan dilakukan melalui member check dan peer review untuk memastikan interpretasi data konsisten dan tidak bias.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Tantangan Implementasi Kebijakan Pangan**

Ketimpangan akses pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak signifikan pada keberlangsungan hidup masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki basis agraris yang kuat, banyak daerah pedesaan masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah infrastruktur yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil. Kondisi jalan yang rusak dan minimnya sarana transportasi menyulitkan distribusi pangan dari petani kecil ke pasar-pasar utama di kota.

Akibatnya, petani kecil sering kali kesulitan untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang menguntungkan.

Tidak hanya itu, perbedaan harga pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi penyebab utama ketimpangan akses pangan. Biaya transportasi yang tinggi dan kurangnya akses pasar yang memadai menyebabkan harga-harga pangan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini berdampak pada kemampuan masyarakat pedesaan untuk membeli pangan dengan harga yang terjangkau. Sebagai akibatnya, banyak rumah tangga di pedesaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka secara teratur. Tingginya biaya pangan ini memaksa mereka untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pangan yang sama dengan yang tersedia di kota [16].

Selain itu, birokrasi yang kompleks dan tingginya tingkat korupsi juga menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan pangan. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk program-program pangan sering kali disalahgunakan oleh oknum pejabat, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran maupun praktik korupsi lainnya. Misalnya, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hadiprayitno tahun 2017, ditemukan bahwa sebagian besar bantuan pangan yang ditujukan untuk masyarakat miskin di daerah-daerah terpencil tidak sampai ke tangan yang seharusnya karena terjadi korupsi di tingkat lokal [17]. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar mereka, yang pada akhirnya memperburuk tingkat ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dampak dari ketimpangan akses pangan ini sangat nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Banyak anak-anak di pedesaan yang mengalami masalah gizi dan stunting akibat kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas. Begitu juga dengan ibu hamil yang kekurangan asupan gizi yang mencukupi, meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketimpangan akses pangan ini dengan meningkatkan aksesibilitas pasar dan infrastruktur di pedesaan, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung harga pangan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

### **3.2 Ketimpangan Akses Pangan antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan**

Ketimpangan akses pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga merupakan masalah yang nyata di Indonesia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara agraris, banyak daerah pedesaan masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap pangan yang cukup dan berkualitas. Infrastruktur yang kurang memadai, terutama di daerah terpencil, menyulitkan distribusi pangan ke daerah-daerah tersebut. Biaya transportasi yang tinggi juga menjadi hambatan serius bagi petani kecil untuk menjual hasil panen mereka ke pasar-pasar utama di kota [18].

Selain itu, perbedaan harga pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan akses pangan. Harga-harga pangan di daerah pedesaan cenderung lebih tinggi daripada di perkotaan karena biaya transportasi yang tinggi dan kurangnya akses pasar yang memadai. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah pedesaan harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pangan yang sama dengan yang tersedia di kota. Sebagai hasilnya, banyak rumah tangga di pedesaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka secara teratur, yang pada akhirnya meningkatkan risiko malnutrisi dan kurang gizi di kalangan anak-anak dan ibu hamil [19].

Tidak hanya itu, perbedaan harga pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi penyebab utama ketimpangan akses pangan. Biaya transportasi yang tinggi dan kurangnya akses pasar yang memadai menyebabkan harga-harga pangan di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini berdampak pada kemampuan masyarakat pedesaan untuk membeli pangan dengan harga yang terjangkau. Sebagai akibatnya, banyak rumah tangga di pedesaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka secara teratur. Tingginya biaya pangan ini memaksa mereka untuk mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli pangan yang sama dengan yang tersedia di kota.

Dampak dari ketimpangan akses pangan ini sangat nyata, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Banyak anak-anak di pedesaan yang mengalami masalah gizi dan stunting akibat kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas. Begitu juga dengan ibu hamil yang kekurangan asupan gizi yang mencukupi, meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi ketimpangan akses pangan ini dengan meningkatkan aksesibilitas pasar dan infrastruktur di pedesaan, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung harga pangan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

### **3.3 Dampak Krisis Pangan pada Kelompok Rentan**

Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia juga rentan terhadap dampak krisis pangan. Data dari UNICEF menunjukkan bahwa prevalensi stunting dan wasting di kalangan anak-anak Indonesia masih tinggi, terutama di daerah-daerah miskin. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi terhadap penyakit infeksi dan masalah kesehatan lainnya di masa depan, sementara anak-anak yang mengalami wasting memiliki risiko kematian yang lebih tinggi [20]. Perempuan hamil dan menyusui juga rentan terhadap malnutrisi, yang dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan yang berbahaya bagi mereka dan bayi yang dikandungnya [21].

Selain itu, lansia juga rentan terhadap krisis pangan karena kemampuan fisik dan ekonomi yang terbatas. Banyak lansia di Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan bergantung pada bantuan pangan dari pemerintah atau keluarga mereka. Ketidakstabilan harga pangan dan kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan mereka mengalami kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus terhadap kebutuhan pangan dan gizi kelompok rentan ini dalam merancang dan melaksanakan program-program pangan [22].

### **3.4 Implikasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, ada beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi krisis pangan di Indonesia. Pertama, diperlukan reformasi dalam sistem pengelolaan ketahanan pangan, termasuk peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Kedua, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses pangan di daerah pedesaan melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan pasar-pasar lokal. Ketiga, perlu ada program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah-daerah terpencil, untuk meningkatkan ketahanan pangan secara mandiri. Keempat, diperlukan upaya khusus untuk melindungi dan mendukung kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia agar tidak terjerumus

ke dalam kemiskinan dan malnutrisi [23]. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat mengatasi krisis pangan yang sedang berlangsung dan mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan untuk seluruh rakyatnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Krisis pangan di Indonesia merupakan tantangan serius yang mempengaruhi jutaan orang setiap tahunnya. Hasil analisis dari perspektif implementasi kebijakan, ketimpangan akses pangan, dan dampak pada kelompok rentan, menyoroti kompleksitas masalah tersebut. Implementasi kebijakan pangan masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, birokrasi yang kompleks, dan tingkat korupsi yang tinggi. Ketimpangan akses pangan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi masalah nyata, dipengaruhi oleh infrastruktur yang kurang memadai dan perbedaan harga pangan. Kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia terpengaruh secara signifikan oleh krisis pangan, meningkatkan risiko malnutrisi dan masalah kesehatan lainnya.

Untuk mengatasi krisis pangan, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang komprehensif. Reformasi dalam sistem pengelolaan ketahanan pangan, peningkatan akses pangan di daerah pedesaan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan khusus untuk kelompok rentan menjadi prioritas utama. Melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, diharapkan Indonesia dapat mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan dan memastikan akses pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya.

#### **REFERENSI**

- [1] FAO. (2020). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2020*. Rome: Food and Agriculture Organization.
- [2] World Bank. (2018). *Strengthening Food Security and Nutrition in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- [3] Adinugraha, H. H., & Kusuma, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pangan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55-70.
- [4] Hadiprayitno, I. I. (2017). Food Security and Human Rights in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(3), 455-472.
- [5] Ministry of Agriculture of Indonesia. (2021). *National Food Security Strategy 2021-2025*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [6] Adinugraha, H. H., & Kusuma, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pangan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55-70.
- [7] Suryana, A. (2019). *Ketimpangan Akses Pangan di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- [8] World Bank. (2018). *Strengthening Food Security and Nutrition in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- [9] UNICEF. (2021). *Nutrition and Food Security in Indonesia: A Report on Malnutrition and Food Insecurity*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- [10] UNICEF. (2021). *Nutrition and Food Security in Indonesia: A Report on Malnutrition and Food Insecurity*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- [11] Kartini, T., & Sutrisno, S. (2020). Strategi Adaptasi Sosial dalam Menghadapi Krisis Pangan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 122-139.

- [12] Kartini, T., & Sutrisno, S. (2020). Strategi Adaptasi Sosial dalam Menghadapi Krisis Pangan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 122-139.
- [13] Ministry of Agriculture of Indonesia. (2021). *National Food Security Strategy 2021-2025*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [14] World Bank. (2018). *Strengthening Food Security and Nutrition in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- [15] Adinugraha, H. H., & Kusuma, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pangan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55-70.
- [16] Adinugraha, H. H., & Kusuma, H. (2018). Implementasi Kebijakan Pangan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(1), 55-70.
- [17] Hadiprayitno, I. I. (2017). Food Security and Human Rights in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 48(3), 455-472.
- [18] World Bank. (2018). *Strengthening Food Security and Nutrition in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- [19] Suryana, A. (2019). *Ketimpangan Akses Pangan di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.
- [20] UNICEF. (2021). *Nutrition and Food Security in Indonesia: A Report on Malnutrition and Food Insecurity*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
- [21] Ministry of Agriculture of Indonesia. (2021). *National Food Security Strategy 2021-2025*. Jakarta: Kementerian Pertanian.
- [22] World Bank. (2018). *Strengthening Food Security and Nutrition in Indonesia*. Washington, D.C.: World Bank Group.
- [23] Kartini, T., & Sutrisno, S. (2020). Strategi Adaptasi Sosial dalam Menghadapi Krisis Pangan di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 15(2), 122-139.